

**BADAN PENDAPATAN
DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja instansi Pemerintah merupakan media untuk mempertanggungjawabkan kinerja instansi selama satu tahun anggaran tertentu. LKIP Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan dari rencana kegiatan tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan LKIP tahun 2020 sepenuhnya mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Sebagai bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka materi dan substansi dalam Perjanjian Kinerja dan LKIP Badan Pendapatan Daerah masih mengacu kepada Rencana Strategis tahun 2017-2022. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan kontribusi dan merupakan cerminan bagi keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan.

LKIP Tahun Anggaran 2020 menyajikan semua capaian kerja dari semua sasaran dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020. Penilaian capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target atau rencana dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun Anggaran 2020 dengan realisasinya.

Untuk penyusunan LKIP Tahun 2020 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan kepada pencapaian kinerja sasaran. Hal ini sesuai dengan semangat akuntabilitas. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan suatu kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik. Adapun pencapaian kinerja kegiatan (dengan indikator kinerja *output* dan *outcome*) akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasaran dengan menyajikan target-target penting yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun mendatang dengan lebih baik.

Jakarta, 31 Januari 2021
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta



M. Tsani Annafari
NIP: 197402121999031001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 telah selesai disusun dengan baik.

Penyusunan LKIP ini diterbitkan sebagai suatu realisasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan agar Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan prinsip *good governance* sebagai syarat bagi setiap pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, tepatguna, dan bertanggung jawab serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sangat disadari bahwa penyusunan LKIP ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ini dapat disusun dan diterbitkan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 ini dapat bermanfaat bagi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat.



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku unsur perangkat daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat dari sektor pelayanan pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah.

1.2 GAMBARAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai **penunjang pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pajak daerah dan retribusi daerah**. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang keuangan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 154 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, bahwa Bapenda memiliki 1 (satu) Sekretariat , 5 (lima) Bidang dan 5 (lima) Suku Badan dimasing-masing wilayah kota. Disamping itu, dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dibentuk pula 43 (empat puluh tiga) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di wilayah Kecamatan, 5 (lima) Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor serta 1 (satu) Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas **menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pendapatan** serta untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPRD;
- c. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;

- d. Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengendalian pendapatan daerah berupa pajak daerah dan pendapatan denda pajak daerah;
- f. Pengoordinasian perencanaan, pengembangan dan pengendalian pendapatan daerah berupa retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, dan pendapatan denda retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan dan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah dan pendapatan denda retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan dan pelayanan dan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, hasil kerjasama daerah, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan denda pajak daerah dan pendapatan denda retribusi daerah
- i. Pengoordinasian pelaksanaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa penerimaan sebagai akibat penjualan BMD, tukar-menukar, dan penerimaan dari hasil pemanfaatan hasil BMD;
- j. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- k. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur

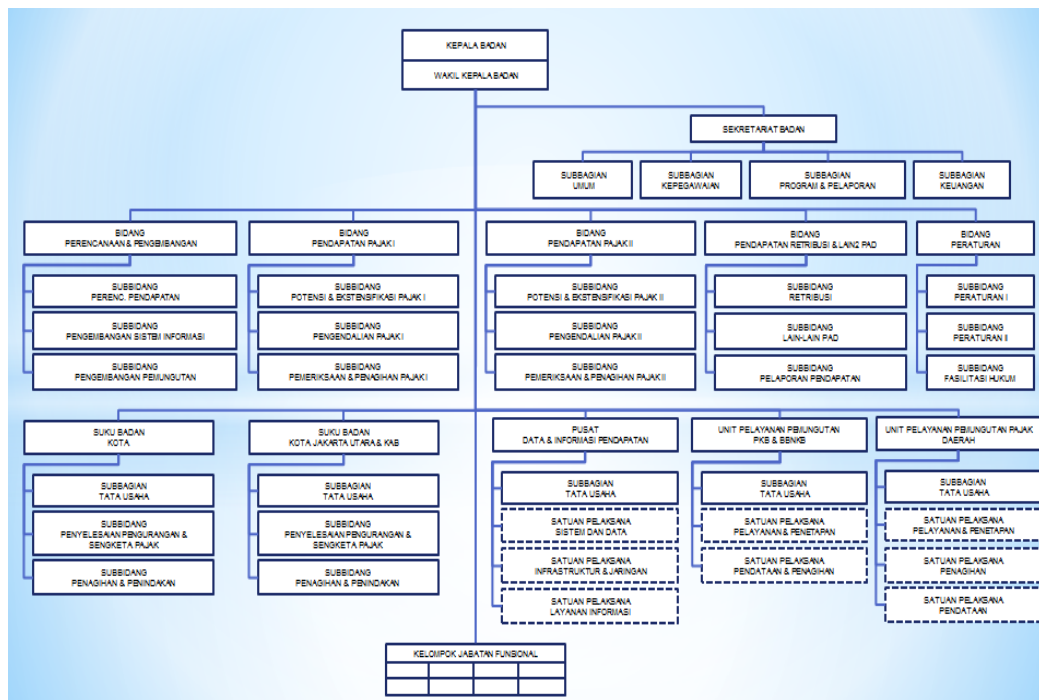
1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 8 huruf (c) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta bahwa Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pajak pendapatan.

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta



Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung dengan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan berkompeten dalam bidangnya. Adapun posisi pegawai per 31 Desember 2020 berjumlah 789 orang, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.

Komposisi SDM menurut Jabatan dan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JABATAN				JUMLAH
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	
1	S-3	1	-	-	-	1
2	S-2	-	49	56	61	166
3	S-1	-	6	26	376	408
5	D-III	-	-	1	137	138
6	SMA	-	-	-	72	72
7	SMP	-	-	-	3	3
8	SD	-	-	-	1	1
JUMLAH		1	55	83	650	789

Tabel 1.2.

Komposisi SDM menurut Golongan dan Kelompok Usia

NO	GOLONGAN	RUANG	USIA				JUMLAH
			21-30	31-40	41-50	51-58	
1	Golongan IV	e	-	-	-	-	0
		d	-	-	-	-	0
		c	-	-	-	-	0
		b	-	-	4	18	22
2	Golongan III	a	-	-	55	51	106
		d	-	7	57	46	110
		c	-	50	54	20	124
		b	1	112	30	14	157
3	Golongan II	a	10	153	3	2	168
		d	2	6	2	-	10
		c	40	2	1	1	44
		b	-	8	33	3	44
4	Golongan I	a	-	-	1	-	1
		d	-	-	1	1	2
		c	-	-	-	-	0
		b	-	-	1	-	1
JUMLAH			53	338	242	156	789

1.5 ISU STRATEGIS

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah tingginya resistensi dan ekspektasi terhadap pelayanan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta.

1.6 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum keberadaan dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam :

1. Ketentuan Umum Pajak Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010
2. Ketentuan Material Pajak Daerah yaitu terdiri dari :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel.
 - e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.

- f. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.
 - g. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.
 - h. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.
 - i. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
 - j. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
 - k. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
 - l. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - m. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
 - n. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
 6. Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP



PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017-2022

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi wilayah yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan masa jabatan Kepala Daerah dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Didalam RKPD Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dengan tujuan untuk memberi arah kemana dan bagaimana suatu SKPD harus dibawa agar tetap eksis dan berkarya secara konsisten, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi juga merupakan pernyataan (*Statement*) tentang mau dijadikan apa organisasi dikemudian hari. Pernyataan visi merupakan pernyataan filosofis, namun pernyataan ini hendaknya menjadi jiwa yang mengarahkan segala tindakan sehingga apa yang diharapkan dalam visi tersebut dapat terwujud.

Sebagai pernyataan yang bersifat filosofis, visi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan arah tindakan dan tujuan yang ingin dicapai, oleh karenanya pernyataan visi bersifat positif dan harus merangsang setiap unsur organisasi berpikir ke arah visi dimaksud. Pernyataan visi sekalipun mencakup jauh kedepan, harus tetap berpijak pada kenyataan pada saat visi tersebut dirumuskan.

Misi juga merupakan suatu pernyataan, misi adalah suatu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang perlu diemban oleh organisasi untuk mencapai visi yang ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi. Sebagai pernyataan, misi masih bersifat luas dan filosofis, tetapi lebih konkrit daripada visi.

Mengacu kepada visi dan Misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, telah dirumuskan visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu :

*VISI : Menjadikan Badan Pendapatan Daerah yang Mampu Mewujudkan **Kemandirian Fiskal** dalam Pembangunan Kota Jakarta*

Penjelasan Visi:

Kemandirian fiskal merupakan aspek yang sangat penting dari otonomi daerah dalam menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, kemandirian fiskal dapat mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber pendapatan daerah yang tersedia.

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Pendapatan Daerah, diperlukan tindakan nyata yang dituangkan ke dalam 2 (dua) misi sesuai dengan tugas dan fungsi antara lain :

- MISI
1. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah
 2. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah, telah dirumuskan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Peningkatan efektivitas dan produktivitas penerimaan Pajak Daerah.
2. Peningkatan efektivitas dan produktivitas penerimaan Retribusi Daerah.

Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Penerimaan Pajak Daerah yang Optimal	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah
2	Penerimaan Retribusi Daerah yang Optimal	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2 (dua) Indikator Kinerja. IKU Badan Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI
1	Jumlah penerimaan pajak daerah	Jumlah rencana penerimaan pajak daerah pada tahun berjalan
2	Jumlah penerimaan retribusi daerah	Jumlah rencana penerimaan retribusi daerah pada tahun berjalan

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka disusun suatu Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan alat ukur dari suatu proses tentang memberikan perspektif mengenai tujuan dan hasil. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam penyusunan kegiatan prioritas yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penerimaan Pajak Daerah Yang Optimal	1 Jumlah penerimaan pajak daerah	32,480,000,000,000.00
		2 Jumlah penerimaan retribusi daerah	468,413,750,000.00
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Yang Transparan, Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi	1 Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
		2 Presentase penyelesaian rencana aksi meraih Laporan Keuangan Daerah Dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	100%
		3 Presentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dengan predikat AA (KSD Nomor 39)	100%
		4 Presentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (KSD nomor 41)	100%
		5 Presentase Penyelesaian rencana aksi perbaikan tata kelola rumah susun sewa dan rumah susun milik (KSD nomor 58)	100%
		6 Presentase Penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD nomor 61)	100%
		7 Presentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	100%
		8 Presentase pemanfaatan E-Order	30%
		9 Presentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%
		10 Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%
		11 Presentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%
		12 Opini laporan keuangan daerah	WTP
		13 Presentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah	426,403,679,577.00	APBD PROVINSI DKI JAKARTA
2	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah	2,727,444,965.00	APBD PROVINSI DKI JAKARTA
3	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah	116,848,983,486.00	APBD PROVINSI DKI JAKARTA

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku salah satu instansi pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Badan Pendapatan Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas masing-masing indikator kinerja, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1	> 100%	Melampaui Target
2	= 100%	Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya dalam meningkatkan akuntabilitas, Badan Pendapatan Daerah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Penerimaan Pajak Daerah Yang Optimal	1 Jumlah penerimaan pajak daerah	32.480.000.000.000,00	31.924.784.307.119,00	98,29%
		2 Jumlah penerimaan retribusi daerah	468.413.750.000,00	496.005.954.940,00	105,89%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Yang Transparan, Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi	1 Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	58,20%	58,20%
		2 Presentase penyelesaian rencana aksi merah Laporan Keuangan Daerah Dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	100%	100%	100%
		3 Presentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dengan predikat AA (KSD Nomor 39)	100%	100%	100%
		4 Presentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (KSD nomor 41)	100%	85,36%	85,36%
		5 Presentase Penyelesaian rencana aksi perbaikan tata kelola rumah susun sewa dan rumah susun milik (KSD nomor 58)	100%	100%	100%
		6 Presentase Penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD nomor 61)	100%	100%	100%
		7 Presentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	100%	100%	100%
		8 Presentase pemanfaatan E-Order	30%	30%	100%
		9 Presentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
		10 Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
		11 Presentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%
		12 Opini laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
		13 Presentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%

Secara keseluruhan rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 sebesar 92,64% atau tidak mencapai target. Pencapaian tersebut berdasarkan capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada 12 (dua belas) indikator yaitu Jumlah penerimaan retribusi daerah, Presentase penyelesaian rencana aksi meraih Laporan Keuangan Daerah Dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38), Presentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dengan predikat AA (KSD Nomor 39), Presentase Penyelesaian rencana aksi perbaikan tata kelola rumah susun sewa dan rumah susun milik (KSD nomor 58), Presentase Penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD nomor 61), Presentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63), Persentase pemanfaatan E-Order, Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur, Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), Opini laporan keuangan daerah dan Presentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan capaian kinerja 100%.

Sementara capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada 3 (tiga) indikator yaitu Jumlah penerimaan pajak daerah dengan capaian kinerja 98,29%, Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan capaian kinerja 58,20% dan Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (KSD nomor 41) dengan capaian kinerja 85,36%.

3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022. Jumlah sasaran yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Tahun 2017-2022 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari 15 (lima belas) indikator kinerja.

Tahun 2020 merupakan periode pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 antara lain diuraikan sebagai berikut :

3.2.1 CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2020

Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi

Sebagai perwujudan atas Sasaran tersebut, dengan jumlah indikator sebanyak 16 (enam belas) indikator kinerja utama dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Penerimaan Pajak Daerah Yang Optimal	1 Jumlah penerimaan pajak daerah	32.480.000.000.000,00	31.924.784.307.119,00	98,29%
		2 Jumlah penerimaan retribusi daerah	468.413.750.000,00	496.005.954.940,00	105,89%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Daerah Yang Transparan, Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi	1 Presentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	58,20%	58,20%
		2 Presentase penyelesaian rencana aksi meraih Laporan Keuangan Daerah Dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	100%	100%	100%
		3 Presentase penyelesaian rencana aksi mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dengan predikat AA (KSD Nomor 39)	100%	100%	100%
		4 Presentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (KSD nomor 41)	100%	85,36%	85,36%
		5 Presentase Penyelesaian rencana aksi perbaikan tata kelola rumah susun sewa dan rumah susun milik (KSD nomor 58)	100%	100%	100%
		6 Presentase Penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD nomor 61)	100%	100%	100%
		7 Presentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	100%	100%	100%
		8 Presentase pemanfaatan E-Order	30%	30%	100%
		9 Presentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
		10 Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
		11 Presentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%
		12 Opini laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
		13 Presentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%

Adapun pelaksanaan kegiatan-kegiatan di dalam program tersebut memiliki kendala-kendala sebagai berikut :

- a. Adanya pandemi Covid19 berpengaruh sangat besar pada capaian realisasi penerimaan pajak daerah
- b. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran dikarenakan adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan

- c. Tidak tercapainya target Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (KSD nomor 41) dikarenakan adanya beberapa kebijakan terkait pandemi Covid19 yaitu tidak dilakukan razia gabungan dan door to door bersama Dirlantas Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja terkait KBm-BDU, SAMOLNAS ditutup oleh Polda Metro Jaya dan adanya kebijakan PSBB yang membatasi kegiatan

3.3 AKUNTABILITAS PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah melalui Dinas Pelayanan Pajak mengelola 13 (tiga belas) jenis pajak daerah yang merupakan gabungan daripada pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, jenis-jenis pajak daerah yang dikelola/dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 13 jenis pajak daerah, antara lain :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

- 4) Pajak Air Tanah (PAT)
- 5) Pajak Hotel
- 6) Pajak Restoran
- 7) Pajak Hiburan
- 8) Pajak Reklame
- 9) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- 10) Pajak Parkir
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 12) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- 13) Pajak Rokok

Berdasarkan hasil kinerja penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah dicapai oleh BPRD Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu Tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

3.3.1 CAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020

Secara umum realisasi penerimaan pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan tingkat pencapaian penerimaan sebesar Rp31.924.784.307.119,00 atau 98,29% dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam APBD Perubahan tahun 2020 sebesar Rp32.480.000.000.000,-, defisit sebesar Rp555.215.692.881,00 atau 1,71%. Secara keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 menurun sebesar Rp8.373.332.755.707,00 atau 20,77% dari realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 40.298.117.062.826,00. Adapun rincian realisasi penerimaan pajak daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING	JENIS PAJAK	APBD 2020	TOTAL REALISASI PENERIMAAN s.d 31 DES 2020	APBD 2019	TOTAL REALISASI PENERIMAAN s.d 31 DES 2019	SELISIH YOY (4-6)	Capaian 2020 (4:3)	Capaian 2019 (6:5)	Capaian 2020 : 2019 (4:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.1.01	PKB	8,000,000,000,000	7,879,325,541,468	8,800,000,000,000	8,844,155,231,721	-964,829,690,253	98.49%	100.50%	89.09%
4.1.1.02	BBN-KB	3,700,000,000,000	3,669,362,320,550	5,650,000,000,000	5,403,535,434,750	-1,734,173,114,200	99.17%	95.64%	67.91%
4.1.1.03	PBB-KB	950,000,000,000	995,258,633,326	1,275,000,000,000	1,262,748,852,467	-267,490,219,141	104.76%	99.04%	78.82%
4.1.1.04	Pajak Air Tanah	75,000,000,000	78,387,858,465	110,000,000,000	125,425,161,737	-47,037,303,272	104.52%	114.02%	62.50%
4.1.1.05	Pajak Hotel	675,000,000,000	749,488,285,186	1,800,000,000,000	1,761,556,750,267	-1,012,068,465,081	111.04%	97.86%	42.55%
4.1.1.06	Pajak Restoran	1,850,000,000,000	1,940,390,778,104	3,550,000,000,000	3,608,461,673,620	-1,668,070,895,516	104.89%	101.65%	53.77%
4.1.1.07	Pajak Hiburan	215,000,000,000	220,354,600,880	850,000,000,000	859,055,631,073	-638,701,030,193	102.49%	101.07%	25.65%
4.1.1.08	Pajak Reklame	775,000,000,000	828,045,160,936	1,050,000,000,000	1,078,475,754,645	-250,430,593,709	106.84%	102.71%	76.78%
4.1.1.09	Pajak Penerangan Jalan	775,000,000,000	778,749,530,103	810,000,000,000	814,112,934,989	-35,363,404,886	100.48%	100.51%	95.66%
4.1.1.10	Pajak Parkir	325,000,000,000	337,745,382,843	525,000,000,000	532,242,383,070	-194,497,000,227	103.92%	101.38%	63.46%
4.1.1.11	BPHTB	5,000,000,000,000	4,681,442,315,680	9,500,000,000,000	5,748,676,054,053	-1,067,233,738,373	93.63%	60.51%	81.44%
4.1.1.13	Pajak Rokok	690,000,000,000	793,754,922,458	620,000,000,000	610,105,644,656	183,649,277,802	115.04%	98.40%	130.10%
4.1.1.14	PBB-P2	9,450,000,000,000	8,972,478,977,120	10,000,000,000,000	9,649,565,555,778	-677,086,578,658	94.95%	96.50%	92.98%
	JUMLAH	32,480,000,000,000	31,924,784,307,119	44,540,000,000,000	40,298,117,062,826	-8,373,332,755,707	98.29%	90.48%	79.22%

Catatan : Angka berdasarkan hasil rekonsiliasi (*unaudited*)

Dari tabel tersebut di atas dapat digambarkan bahwa dari 13 (tiga belas) jenis Pajak Daerah, terdapat 9 (sembilan) jenis pajak yang mencapai target Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 yaitu :

- 1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- 2) Pajak Air Tanah
- 3) Pajak Hotel
- 4) Pajak Restoran
- 5) Pajak Hiburan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Reklame
- 8) Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
- 9) Pajak Rokok

Sedangkan terdapat 4 (empat) jenis Pajak Daerah tidak mencapai target penerimaan, yaitu :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- 3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

A. RINCIAN PENCAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2020

Mengingat potensi yang besar dari pajak daerah menjadikannya sebagai salah satu pendukung pembiayaan daerah yang sangat potensial. Berikut ini disampaikan rencana dan realisasi penerimaan per jenis pajak daerah sebagai berikut :

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp7.879.325.541.468,00 atau 98,49% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp.8.000.000.000.000,-.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp3.669.362.320.550,00 atau 99,17%. dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp3.700.000.000.000,00.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp995.258.633.326,00 atau 104,76% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp950.000.000.000,00.

4) Pajak Air Tanah (PAT)

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah Rp78.387.858.465,00 atau 104,52% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00.

5) Pajak Hotel

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp749.488.285.186,00 atau 111,04% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp675.000.000.000,00.

6) Pajak Restoran

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp1.940.390.778.104,00 atau 104,89% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp1.850.000.000.000,00.

7) Pajak Hiburan

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp220.354.600.880,00 atau 102,49% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp215.000.000.000,00 .

8) Pajak Reklame

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat

adalah sebesar Rp828.045.160.936,00 atau 106,84% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp775.000.000.000,00.

9) Pajak Penerangan Jalan

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp778.749.530.103,00 atau 100,48% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp775.000.000.000,00.

10) Pajak Parkir

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp337.745.382.843,00 atau 103,92% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp325.000.000.000,00.

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp4.681.442.315.680,00 atau 93,63% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000,00.

12) Pajak Rokok

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp793.754.922.458,00 atau 115,04% dari

rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp690.000.000.000,00.

13) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBB-P2)

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp8.972.478.977.120,00 atau sebesar 94,95% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp9.450.000.000.000,00.

B. PENJELASAN TERHADAP JENIS PAJAK YANG TIDAK TERCAPAI

Selanjutnya terhadap 4 (empat) jenis pajak yang tidak mencapai target Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- a) Beberapa kendala yang disinyalir menjadi penyebab terhambatnya penerimaan PKB di tahun 2020, antara lain :
 - Adanya pandemi Covid19 yang mempengaruhi penjualan mobil secara nasional pada 2020 sebagaimana dicatat Gaikindo, penjualan mobil hanya mencapai 532.027 unit yang menurun 48,35% jika dibandingkan secara *year to year* dengan tahun 2019 sebesar 1.030.126 unit
 - Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak pajak dalam membayar PKB

- Adanya beberapa kebijakan terkait pandemi Covid19 yaitu tidak dilakukan razia gabungan dan door to door bersama Dirlantas Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja terkait KBm-BDU
 - SAMOLNAS ditutup oleh Polda Metro Jaya
- b) Upaya–upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan PKB tahun 2020, antara lain :
- Mendorong adanya stimulus penghapusan sanksi administrasi untuk piutang PKB
 - Optimalisasi penerapan *tax clearance* atas BBN-KB kepada wajib pajak yang tengah mengurus perijinan pada DPM-PTSP

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- a) Beberapa kendala yang disinyalir menjadi penyebab terhambatnya penerimaan BBN-KB di tahun 2020, antara lain :
- Transaksi penjualan KBm pada penyerahan kedua dan seterusnya tidak diiringi dengan pelaporan wajib pajak untuk *update* data kepemilikan KBm.
 - Adanya pandemi Covid19 yang mempengaruhi penjualan mobil secara nasional pada 2020 sebagaimana dicatat Gaikindo, penjualan mobil hanya mencapai 532.027 unit yang menurun 48,35% jika dibandingkan secara *year to year* dengan tahun 2019 sebesar 1.030.126 unit.
- b) Merujuk pada kendala-kendala tersebut di atas dan guna memaksimalkan penerimaan BBNKB di tahun 2020, telah dilakukan beberapa upaya-upaya, antara lain :

- Menerbitkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 tentang BBN-KB yang mengatur perubahan tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama menjadi 12,5% dari sebelumnya 10%.
- Menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi sebagai stimulus optimalisasi penerimaan BBN-KB.
- Optimalisasi penerapan *tax clearance* atas BBN-KB kepada wajib pajak yang tengah mengurus perijinan pada DPM-PTSP.
- Melakukan Pemblokiran Kendaraan Bermotor yang sudah dijual melalui aplikasi
- Penerapan ganjil genap terhadap seluruh ruas jalan utama/provinsi

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- a) Adapun beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan BPHTB antara lain sebagai berikut:
- banyaknya apartemen yang belum dilakukan pemecahan;
 - Pelemahan sektor properti yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid19 dan penurunan daya beli disertai dengan harga properti yang melambung, sehingga membuat masyarakat menahan untuk membeli properti
 - Adanya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran BPHTB melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
 - Banyaknya Pengelola/Pengembang Apartemen yang tidak menyetorkan BPHTB yang telah dipungut ke pembeli pada saat transaksi PPJB (BPHTB menjadi komponen pada harga beli);

- Adanya kecenderungan transaksi masih menggunakan harga NJOP (bukan harga transaksi sebenarnya);
 - Adanya kecenderungan masyarakat untuk menunda pembelian properti dan memprioritaskan pembelian kepada barang-barang primer.
- b) Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan BPHTB tahun 2020, antara lain :
- Melakukan koordinasi secara intens dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melakukan pelaporan nilai transaksi sesuai dengan nilai yang sebenarnya.
 - Melakukan pendataan atas transaksi PPJB dan himbauan untuk segera melakukan pembayaran BPHTB
 - Optimalisasi dan Penyempurnaan Sistem E – BPHTB
 - Mendorong revisi Pergub Nomor 126 Tahun 2017 dengan mengecualikan apartemen non subsidi
 - Melakukan pengumpulan data transaksi jual beli baik yang dipublish di internet maupun di lapangan sebagai pembanding dan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan
 - Pengawasan objek BPHTB yang berubah bentuk/ukuran;

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

- a) Beberapa kendala yang menjadi penghambat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, antara lain :
- Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak pajak dalam membayar PBB-P2 .
 - Belum optimalnya penagihan aktif.

- Masih adanya basis data objek pajak PBB-P2 yang bermasalah dalam pemungutannya, dikarenakan adanya objek sengketa, Penetapan ganda (double object), dan SPPT tidak dapat disampaikan karena objek dan subjek tidak dapat ditemukan
- b) Sebagai langkah untuk optimalisasi penerimaan PBB-P2, telah dilakukan upaya-upaya, antara lain :
- Pendataan objek PBB-P2 yang telah berubah fisik dan fungsi (Inkaban No. 1 Tahun 2020);
 - Penyampaian SPPT dan penagihan PBB-P2 bekerjasama dengan Walikota, Kecamatan dan Kelurahan;
 - Fiscal Cadaster PBB-P2 bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) yang disupervisi oleh Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah KPK - RI;
 - Pemasangan Plang penunggak PBB-P2;
 - Penagihan PBB-P2 bersama KPK - RI dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
 - Mendorong adanya stimulus pengurangan pokok piutang dan penghapusan sanksi administrasi untuk piutang PBB-P2

3.3.2 CAPAIAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020

Secara umum realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan tingkat pencapaian penerimaan sebesar Rp496.005.954.940,00 atau 105,89% dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam APBD tahun 2020 sebesar Rp468.413.750.000,00. Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020 menurun sebesar

Rp91.450.642.392,00 dari realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2019. Adapun rincian realisasi penerimaan retribusi daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI	APBD 2020	TOTAL REALISASI PENERIMAAN s.d 31 DES 2020	APBD 2019	TOTAL REALISASI PENERIMAAN s.d 31 DES 2019	SELISIH YOY (4-6)	Capaian 2020 (4:3)	Capaian 2019 (6:5)	Capaian 2020 : 2019 (4:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	102,522,000,000	107,955,310,022	114,097,000,000	132,523,502,232	-24,568,192,210	105.30%	116.15%	81.46%
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	84,169,750,000	86,917,231,433	174,284,000,000	178,096,970,520	-91,179,739,087	103.26%	102.19%	48.80%
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	281,722,000,000	301,133,413,485	421,750,000,000	276,836,124,580	24,297,288,905	106.89%	65.64%	108.78%
	JUMLAH	468,413,750,000	496,005,954,940	710,131,000,000	587,456,597,332	-91,450,642,392	105.89%	82.73%	84.43%

Dari tabel tersebut di atas dapat digambarkan bahwa 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah seluruhnya mencapai target penerimaan tahun anggaran 2020 yang telah ditetapkan.

A. RINCIAN PENCAPAIAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020

1) Retribusi Jasa Umum

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp107.955.310.022,00 atau 105,30% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp102.522.000.000,00.

2) Retribusi Jasa Usaha

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp86.917.231.433,00 atau 103,26% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp84.169.750.000,00.

3) Retribusi Perijinan Tertentu

Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan tingkat pencapaian penerimaan yang didapat adalah sebesar Rp301.133.413.485,00 atau 106,89% dari rencana penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp281.722.000.000,00.

B. PENJELASAN TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

Sebagai langkah untuk optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, telah dilakukan upaya-upaya, antara lain:

- Melakukan pengembangan e-retribusi dengan QRIS (Quick Response Indonesia Standard) BI untuk memudahkan pembayaran retribusi oleh masyarakat serta pengembangan integrasi dengan sistem di SKPD terkait yang melakukan pemungutan retribusi
- Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- Membuat perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Perbankan dalam rangka pembayaran retribusi Daerah.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Selama tahun anggaran 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020 Provinsi DKI Jakarta DPA Perubahan Badan Pendapatan Daerah dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp799.519.117.155,00 dengan pencapaian realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp465.355.816.134,00 atau dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 58,20%.

Adapun rekapitulasi pagu dan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta DPA Perubahan tahun anggaran 2020 antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.6

Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2020

NO	JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	PENYERAPAN ANGGARAN	(4:3)
1	2	3	4	5
1	Belanja Langsung Badan	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08%
2	Belanja Langsung Suban	916.524.918	614.038.550	67,00%
3	Belanja Tidak Langsung	672.860.882.647	374.109.752.320	55,60%
Jumlah		799.519.117.155	465.355.816.134	58,20%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2020. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, dapat diketahui dari capaian kinerja anggaran yang diserap pada tahun anggaran 2020 sebagaimana rincian dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7

Penyerapan Anggaran Kegiatan Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

No	Uraian / Unit	Tahun 2020				Persentase Penyerapan Anggaran terhadap APBD 2020	Persentase Penyerapan Anggaran terhadap APBD-P 2020
		APBD 2020	APBD-P 2020	Penyerapan Anggaran TA 2020			
	1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3	
	TOTAL	1.788.181.738.304	799.519.117.155	465.355.816.134	26,02%	58,20%	
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.242.201.630.276	672.860.882.647	374.109.752.320	30,12%	55,60%	
2	BELANJA LANGSUNG	545.980.108.028	126.658.234.508	91.246.063.814	16,71%	72,04%	
*	Badan	544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	16,64%	72,08%	
**	Suku Badan	1.304.221.582	916.524.918	614.038.550	47,08%	67,00%	
	- Jakarta Barat	264.330.862	224.657.330	117.816.420	44,57%	52,44%	
	- Jakarta Pusat	294.891.570	253.962.140	116.590.600	39,54%	45,91%	
	- Jakarta Selatan	230.889.922	171.463.040	159.250.320	68,97%	92,88%	
	- Jakarta Timur	277.596.660	101.272.200	97.892.050	35,26%	96,66%	
	- Jakarta Utara	236.512.568	165.170.208	122.489.160	51,79%	74,16%	

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	UNIT KERJA	URAIAN			ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PENYERAPAN		KET
				NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			SPJ	%SPJ	
I. BELANJA LANGSUNG							544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
	4.02.05	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah				426.066.826.258	48.813.781.159	23.235.097.834	47,60		
		SAMSAT PUSAT	1	4.02.05.001	Pelaksanaan Pelayanan Pajak melalui Gerai Pelayanan Pajak di Jakarta Pusat	106.893.600	106.893.600	71.851.110	67,22		
		SAMSAT UTARA	2	4.02.05.002	Pelaksanaan Pelayanan Pajak melalui Gerai Pelayanan Pajak di Jakarta Utara	154.644.000	154.644.000	109.405.191	70,75		
		SAMSAT BARAT	3	4.02.05.003	Pelaksanaan Razia Door to Door di Jakarta Barat	54.277.830	54.277.830	17.978.400	33,12		
		SAMSAT PUSAT	4	4.02.05.004	Pelaksanaan Razia Door to Door di Jakarta Pusat	41.817.360	41.817.360	6.893.520	16,48		
		SAMSAT SELATAN	5	4.02.05.005	Pelaksanaan Razia Door to Door di Jakarta Selatan	40.210.320	40.210.320	-	-		
		SAMSAT TIMUR	6	4.02.05.006	Pelaksanaan Razia Door to Door di Jakarta Timur	41.023.290	41.023.290	28.796.250	70,19		
		SAMSAT UTARA	7	4.02.05.007	Pelaksanaan Razia Door to Door di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	40.210.320	40.210.320	8.834.240	21,97		
		SAMSAT BARAT	8	4.02.05.008	Pelaksanaan Razia Gabungan di Jakarta Barat	89.157.420	89.157.420	11.107.800	12,46		
		SAMSAT PUSAT	9	4.02.05.009	Pelaksanaan Razia Gabungan di Jakarta Pusat	84.133.420	84.133.420	10.449.960	12,42		
		SAMSAT SELATAN	10	4.02.05.010	Pelaksanaan Razia Gabungan di Jakarta Selatan	88.481.100	88.481.100	11.181.500	12,64		
		SAMSAT TIMUR	11	4.02.05.011	Pelaksanaan Razia Gabungan di Jakarta Timur	72.693.230	72.693.230	9.062.120	12,47		
		SAMSAT UTARA	12	4.02.05.012	Pelaksanaan Razia Gabungan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	88.620.920	88.620.920	11.042.800	12,46		
		BIDANG PENDAPATAN PAJAK I	13	4.02.05.013	Pelaksanaan Sensus Pajak Daerah	86.474.319.802	36.399.377.230	15.027.268.296	41,28		
		UPPPD CAKUNG	14	4.02.05.014	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Cakung	30.534.890	30.534.890	30.534.790	100,00		
		UPPPD CEMPAKA PUTIH	15	4.02.05.015	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih	13.276.500	13.276.500	13.276.500	100,00		
		UPPPD CENGKARENG	16	4.02.05.016	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Cengkareng	6.900.000	6.900.000	6.900.000	100,00		
		UPPPD CILANDAK	17	4.02.05.017	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Cilandak	5.688.600	5.688.600	5.688.600	100,00		
		UPPPD CILINCING	18	4.02.05.018	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Cilincing	6.962.640	6.962.640	6.734.520	96,72		
		UPPPD CIPAYUNG	19	4.02.05.019	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Cipayung	35.999.478	35.999.478	25.664.300	71,29		
		UPPPD CIRACAS	20	4.02.05.020	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Ciracas	11.654.890	11.654.890	11.647.100	99,93		
		UPPPD DUREN SAWIT	21	4.02.05.021	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Duren Sawit	11.410.692	11.410.692	11.403.550	99,94		
		UPPPD GAMBIR	22	4.02.05.022	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Gambir	19.096.776	19.096.776	17.146.776	89,79		
		UPPPD GROGOL PETAMBURAN	23	4.02.05.023	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan	16.496.800	16.136.800	15.776.800	97,77		
		UPPPD JAGAKARSA	24	4.02.05.024	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Jagakarsa	11.436.510	11.436.510	11.436.510	100,00		

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	UNIT KERJA	URAIAN			ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PENYERAPAN		KET
				NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			SPJ	%SPJ	
I. BELANJA LANGSUNG							544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
	4.02.05	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah					426.066.826.258	48.813.781.159	23.235.097.834	47,60	
			UPPPD JATINEGARA	25	4.02.05.025	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Jatinegara	13.087.540	13.087.540	13.078.900	99,93	
			UPPPD JOHAR BARU	26	4.02.05.026	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Johar Baru	8.346.088	8.346.088	8.346.088	100,00	
			UPPPD KALIDERES	27	4.02.05.027	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kalideres	14.529.360	14.529.360	14.529.360	100,00	
			UPPPD KEBAYORAN BARU	28	4.02.05.028	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru	11.679.150	11.679.150	11.679.150	100,00	
			UPPPD KEBAYORAN LAMA	29	4.02.05.029	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama	6.900.000	6.900.000	6.900.000	100,00	
			UPPPD KEBON JERUK	30	4.02.05.030	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kebon Jeruk	50.419.480	50.419.480	50.419.480	100,00	
			UPPPD KELAPA GADING	31	4.02.05.031	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading	8.148.580	8.148.580	6.634.000	81,41	
			UPPPD KEMAYORAN	32	4.02.05.032	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kemayoran	9.578.320	9.578.320	9.527.000	99,46	
			UPPPD KEMBANGAN	33	4.02.05.033	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kembangan	12.750.000	12.750.000	12.750.000	100,00	
			UPPPD KEPULAUAN SERIBU	34	4.02.05.034	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu	1.670.000	1.670.000	1.670.000	100,00	
			UPPPD KOJA	35	4.02.05.035	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Koja	8.850.450	8.850.450	8.850.360	100,00	
			UPPPD KRAMAT JATI	36	4.02.05.036	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kramat Jati	8.685.464	7.710.464	6.725.840	87,23	
			UPPPD MAKASAR	37	4.02.05.037	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Makasar	22.846.910	22.846.910	22.835.100	99,95	
			UPPPD MAMPANG PRAPATAN	38	4.02.05.038	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan	13.573.460	13.573.460	13.573.460	100,00	
			UPPPD MATRAMAN	39	4.02.05.039	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Matraman	9.485.130	9.485.130	9.481.520	99,96	
			UPPPD MENTENG	40	4.02.05.040	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Menteng	17.522.316	17.522.316	11.522.196	65,76	
			UPPPD PADEMANGAN	41	4.02.05.041	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Pademangan	6.400.000	6.400.000	6.400.000	100,00	
			UPPPD PALMERAH	42	4.02.05.042	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Palmerah	15.726.084	15.726.084	15.726.084	100,00	
			UPPPD PANCORAN	43	4.02.05.043	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Pancoran	4.587.360	4.587.360	4.587.200	100,00	
			UPPPD PASAR MINGGU	44	4.02.05.044	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu	20.302.572	19.327.572	18.352.572	94,96	
			UPPPD PASAR REBO	45	4.02.05.045	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Pasar Rebo	13.826.534	13.286.534	12.739.300	95,88	
			UPPPD PENJARINGAN	46	4.02.05.046	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Penjaringan	13.448.400	13.448.400	13.427.500	99,84	

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	UNIT KERJA	URAIAN			ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PENYERAPAN		KET
				NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			SPJ	%SPJ	
I. BELANJA LANGSUNG							544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
	4.02.05	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah					426.066.826.258	48.813.781.159	23.235.097.834	47,60	
		UPPPD PESANGGRAHAN	47	4.02.05.047	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Pesanggrahan	7.321.280	7.321.280	7.321.280	100,00		
		UPPPD PULOGADUNG	48	4.02.05.048	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Pulo Gadung	16.265.432	16.265.432	16.247.700	99,89		
		UPPPD SAWAH BESAR	49	4.02.05.049	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Sawah Besar	17.752.840	17.752.840	17.745.800	99,96		
		UPPPD SENEN	50	4.02.05.050	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Senen	6.607.480	6.607.480	2.800.000	42,38		
		UPPPD SETIABUDI	51	4.02.05.051	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Setiabudi	22.283.950	22.283.950	22.283.920	100,00		
		UPPPD TAMAN SARI	52	4.02.05.052	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Taman Sari	32.717.440	32.717.440	-	-		
		UPPPD TAMBORA	53	4.02.05.053	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Tambora	10.404.360	10.404.360	10.404.360	100,00		
		UPPPD TANAH ABANG	54	4.02.05.054	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Tanah Abang	17.980.960	17.980.960	17.972.840	99,95		
		UPPPD TANJUNG PRIOK	55	4.02.05.055	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok	13.125.000	13.125.000	13.125.000	100,00		
		UPPPD TEBET	56	4.02.05.056	Pemasangan Tanda atas Objek Penunggak Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Tebet	5.360.000	3.930.000	3.930.000	100,00		
		UPT PUSDATIN	57	4.02.05.057	Pengadaan Infrastruktur Penunjang Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	44.161.049.522	4.171.104.692	1.667.375.000	39,97		
		UPT PUSDATIN	58	4.02.05.058	Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah	1.310.400.000	1.310.400.000	1.210.300.000	92,36		
		SAMSAT BARAT	59	4.02.05.059	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Kendaraan di Jakarta Barat	193.875.000	193.875.000	127.931.650	65,99		
		SAMSAT PUSAT	60	4.02.05.060	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Kendaraan di Jakarta Pusat	193.875.000	193.875.000	127.931.650	65,99		
		SAMSAT SELATAN	61	4.02.05.061	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Kendaraan di Jakarta Selatan	193.875.000	193.875.000	130.542.500	67,33		
		SAMSAT TIMUR	62	4.02.05.062	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Kendaraan di Jakarta Timur	193.875.000	193.875.000	127.931.650	65,99		
		SAMSAT UTARA	63	4.02.05.063	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Kendaraan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	193.875.000	193.875.000	127.931.650	65,99		
		UPPPD CAKUNG	64	4.02.05.064	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Cakung	27.000.000	27.000.000	26.730.000	99,00		
		UPPPD CEMPAKA PUTIH	65	4.02.05.065	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Cempaka Putih	18.000.000	18.000.000	12.000.000	66,67		
		UPPPD CENGKARENG	66	4.02.05.066	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Cengkareng	16.500.000	16.500.000	16.500.000	100,00		
		UPPPD CILANDAK	67	4.02.05.067	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Cilandak	19.800.000	19.800.000	19.800.000	100,00		
		UPPPD CILINCING	68	4.02.05.068	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Cilincing	13.860.000	13.860.000	12.540.000	90,48		
		UPPPD CIPAYUNG	69	4.02.05.069	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Cipayung	5.445.000	5.445.000	5.445.000	100,00		
		UPPPD CIRACAS	70	4.02.05.070	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Ciracas	4.950.000	4.950.000	4.950.000	100,00		

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	UNIT KERJA	URAIAN			ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PENYERAPAN		KET
				NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			SPJ	%SPJ	
I. BELANJA LANGSUNG							544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
	4.02.05	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah					426.066.826.258	48.813.781.159	23.235.097.834	47,60	
		UPPPD DUREN SAWIT	71	4.02.05.071	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Duren Sawit		9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00	
		UPPPD GAMBIR	72	4.02.05.072	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Gambir		36.300.000	36.300.000	32.569.500	89,72	
		UPPPD GROGOL PETAMBURAN	73	4.02.05.073	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Grogol Petamburan		33.000.000	33.000.000	33.000.000	100,00	
		UPPPD JAGAKARSA	74	4.02.05.074	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Jagakarsa		39.600.000	39.600.000	39.600.000	100,00	
		UPPPD JATINEGARA	75	4.02.05.075	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Jatinegara		9.900.000	9.900.000	9.859.000	99,59	
		UPPPD JOHAR BARU	76	4.02.05.076	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Johar Baru		5.940.000	5.940.000	5.940.000	100,00	
		UPPPD KALIDERES	77	4.02.05.077	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kalideres		33.000.000	33.000.000	32.775.000	99,32	
		UPPPD KEBAYORAN BARU	78	4.02.05.078	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Baru		19.800.000	19.800.000	19.800.000	100,00	
		UPPPD KEBAYORAN LAMA	79	4.02.05.079	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama		24.750.000	24.750.000	24.750.000	100,00	
		UPPPD KEBON JERUK	80	4.02.05.080	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kebon Jeruk		33.000.000	33.000.000	33.000.000	100,00	
		UPPPD KELAPA GADING	81	4.02.05.081	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kelapa Gading		23.595.000	23.595.000	18.579.000	78,74	
		UPPPD KEMAYORAN	82	4.02.05.082	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kemayoran		19.800.000	19.800.000	19.107.000	96,50	
		UPPPD KEMBANGAN	83	4.02.05.083	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kembangan		16.500.000	16.500.000	16.500.000	100,00	
		UPPPD KEPULAUAN SERIBU	84	4.02.05.084	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu		4.125.000	4.125.000	4.125.000	100,00	
		UPPPD KOJA	85	4.02.05.085	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Koja		24.750.000	24.750.000	24.750.000	100,00	
		UPPPD KRAMAT JATI	86	4.02.05.086	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Kramat Jati		9.900.000	9.900.000	9.900.000	100,00	
		UPPPD MAKASAR	87	4.02.05.087	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Makasar		11.550.000	11.550.000	11.550.000	100,00	
		UPPPD MAMPANG PRAPATAN	88	4.02.05.088	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Mampang Prapatan		19.800.000	19.800.000	19.800.000	100,00	
		UPPPD MATRAMAN	89	4.02.05.089	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Matraman		9.900.000	9.900.000	9.306.000	94,00	

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	UNIT KERJA	URAIAN			ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PENYERAPAN		KET
				NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			SPJ	%SPJ	
I. BELANJA LANGSUNG							544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
	4.02.05	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah					426.066.826.258	48.813.781.159	23.235.097.834	47,60	
		UPPPD MENTENG	90	4.02.05.090	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Menteng	36.300.000	36.300.000	36.300.000	100,00		
		UPPPD PADEMANGAN	91	4.02.05.091	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Pademangan	39.973.200	39.973.200	39.973.200	100,00		
		UPPPD PALMERAH	92	4.02.05.092	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Palmerah	99.000.000	99.000.000	99.000.000	100,00		
		UPPPD PANCORAN	93	4.02.05.093	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Pancoran	9.900.000	9.900.000	9.900.000	100,00		
		UPPPD PASAR MINGGU	94	4.02.05.094	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu	27.225.000	27.225.000	27.225.000	100,00		
		UPPPD PASAR REBO	95	4.02.05.095	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Pasar Rebo	16.500.000	16.500.000	16.500.000	100,00		
		UPPPD PENJARINGAN	96	4.02.05.096	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Penjarangan	49.500.000	49.500.000	49.500.000	100,00		
		UPPPD PESANGGRAHAN	97	4.02.05.097	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Pesanggrahan	17.820.000	17.820.000	17.820.000	100,00		
		UPPPD PULOGADUNG	98	4.02.05.098	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Pulo Gadung	36.000.000	36.000.000	34.791.000	96,64		
		UPPPD SAWAH BESAR	99	4.02.05.099	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Sawah Besar	27.720.000	27.720.000	27.670.500	99,82		
		UPPPD SENEN	100	4.02.05.100	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Senen	14.058.000	14.058.000	2.185.500	15,55		
		UPPPD SETIABUDI	101	4.02.05.101	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Setiabudi	8.250.000	8.250.000	8.250.000	100,00		
		UPPPD TAMAN SARI	102	4.02.05.102	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Taman Sari	27.225.000	27.225.000	27.225.000	100,00		
		UPPPD TAMBORA	103	4.02.05.103	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Tambora	11.550.000	11.550.000	11.550.000	100,00		
		UPPPD TANAH ABANG	104	4.02.05.104	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Tanah Abang	54.450.000	54.450.000	54.450.000	100,00		
		UPPPD TANJUNG PRIOK	105	4.02.05.105	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Tanjung Priok	29.700.000	29.700.000	29.700.000	100,00		
		UPPPD TEBET	106	4.02.05.106	Penyampaian Surat Panggilan Kepada Wajib Pajak yang mempunyai Tunggakan/Piutang Pajak Daerah di Wilayah Kecamatan Tebet	8.250.000	8.250.000	8.217.000	99,60		

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	UNIT KERJA	URAIAN		ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PENYERAPAN		KET
				NO	KODE KEGIATAN			NAMA KEGIATAN	SPJ	
I. BELANJA LANGSUNG						544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
	4.02.05	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah				426.066.826.258	48.813.781.159	23.235.097.834	47,60	
		SUBBAG KEPEGAWAIAN	107	4.02.05.107	Pelaksanaan Diklat Administrasi Pendapatan Daerah (Adpenda)	192.296.150	-	-	#DIV/0!	
		SUBBAG KEPEGAWAIAN	108	4.02.05.108	Pelaksanaan Diklat Teknis Pemeriksaan Pajak	132.821.150	-	-	#DIV/0!	
		SUBBAG UMUM	109	4.02.05.110	Perbaikan Gedung Samsat	30.178.403.529	-	-	#DIV/0!	
		SUBBAG UMUM	110	4.02.05.114	Pembangunan Gedung UPPRD Kebon Jeruk	17.391.728.356	-	-	#DIV/0!	
		SUBBAG UMUM	111	4.02.05.117	Penyediaan Tenaga Ahli/Narasumber Bidang Pajak dan Retribusi	765.677.708	-	-	#DIV/0!	
		SUBBAG UMUM	112	4.02.05.118	Penyediaan Sewa Gedung UPPRD Kebon Jeruk	505.032.000	505.032.000	379.980.000	75,24	
		UPT PUSDATIN	113	4.02.05.119	Pelaksanaan Sertifikasi ISO Pelayanan Pajak	984.721.650	-	-	#VALUE!	
		UPT PUSDATIN	114	4.02.05.120	Pengadaan Bahan Publikasi Pajak Daerah	1.632.997.960	765.082.560	451.935.000	59,07	
		SAMSAT BARAT	115	4.02.05.121	Penyampaian TBP KP dan Pengesahan STNK Kepada Wajib Pajak yang telah membayar PKB melalui Samsat Online Nasional (Samolnas) di Jakarta Barat	29.475.000	29.475.000	19.449.570	65,99	
		SAMSAT PUSAT	116	4.02.05.122	Penyampaian TBP KP dan Pengesahan STNK Kepada Wajib Pajak yang telah membayar PKB melalui Samsat Online Nasional (Samolnas) di Jakarta Pusat	29.475.000	29.475.000	19.449.570	65,99	
		SAMSAT SELATAN	117	4.02.05.123	Penyampaian TBP KP dan Pengesahan STNK Kepada Wajib Pajak yang telah membayar PKB melalui Samsat Online Nasional (Samolnas) di Jakarta Selatan	187.500.000	187.500.000	98.995.600	52,80	
		SAMSAT TIMUR	118	4.02.05.124	Penyampaian TBP KP dan Pengesahan STNK Kepada Wajib Pajak yang telah membayar PKB melalui Samsat Online Nasional (Samolnas) di Jakarta Timur	30.975.000	30.975.000	20.439.370	65,99	
		SAMSAT UTARA	119	4.02.05.125	Penyampaian TBP KP dan Pengesahan STNK Kepada Wajib Pajak yang telah membayar PKB melalui Samsat Online Nasional (Samolnas) di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	29.475.000	29.475.000	19.449.570	65,99	
		UPT PUSDATIN	120	4.02.05.126	Penyampaian Informasi terkait Kewajiban Perpajakan	3.129.994.105	377.217.951	372.500.711	98,75	
		UPT PUSDATIN	121	4.02.05.128	Penghargaan Kepada Wajib Pajak, Media Gathering dan Launching Inovasi BPRD	1.358.690.190	-	-	#DIV/0!	
		UPT PUSDATIN	122	4.02.05.132	Pengelolaan Layanan Call Center	1.433.388.000	1.433.388.000	1.427.910.000	99,62	
		BIDANG PENDAPATAN PAJAK II	123	4.02.05.134	Pelaksanaan Gijzeling Pajak Daerah	139.999.470	-	-	#DIV/0!	
		UPT PUSDATIN	124	4.02.05.135	Pembangunan Sistem Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah	2.000.000.000	-	-	#DIV/0!	
		SAMSAT SELATAN	125	4.02.05.136	Peningkatan Pemahaman Wajib Pajak Kendaraan Mobil Mewah di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Selatan	63.195.000	63.195.000	61.245.000	96,91	
		UPT PUSDATIN	126	4.02.05.137	Pengadaan perangkat Data Operasional Platform Infrastruktur Online Sistem Pajak Daerah	49.999.999.820	-	-	#DIV/0!	
		UPT PUSDATIN	127	4.02.05.138	Peningkatan Kapabilitas Data Analytic dan Manajemen Resiko	128.999.998.120	-	-	#DIV/0!	
		UPT PUSDATIN	128	4.02.05.139	Pengembangan Sistem TI Pajak Terintegrasi	50.000.000.000	-	-	#DIV/0!	
		BIDANG RENBANG	129	4.02.05.140	Pengembangan Tata Kelola TI Pajak Daerah	1.418.850.000	-	-	#DIV/0!	

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	UNIT KERJA	URAIAN			ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PENYERAPAN		KET
				NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			SPJ	%SPJ	
I. BELANJA LANGSUNG							544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
	4.02.07	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah				115.881.615.223	75.190.743.891	65.767.254.468	87,47		
		SUBBAG UMUM	130	4.02.07.001	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	20.964.550.321	17.012.825.993	15.840.869.317	93,11		
		SUBBAG UMUM	131	4.02.07.002	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	1.550.056.321	741.141.324	674.237.300	90,97		
		SUBBAG UMUM	132	4.02.07.003	Penyediaan alat tulis kantor	4.928.350.350	4.816.779.220	3.784.422.390	78,57		
		SUBBAG UMUM	133	4.02.07.005	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	9.617.825.265	9.403.043.445	9.194.887.409	97,79		
		SUBBAG UMUM	134	4.02.07.006	Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	11.678.238.078	10.460.885.832	10.394.349.136	99,36		
		SUBBAG UMUM	135	4.02.07.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	37.091.032	-	-	#DIV/0!		
		SUBBAG UMUM	136	4.02.07.008	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	281.158.449	-	-	#DIV/0!		
		SUBBAG UMUM	137	4.02.07.009	Perbaikan Gedung Badan Pajak dan Retribusi Daerah	7.092.028.132	-	-	#DIV/0!		
		SUBBAG UMUM	138	4.02.07.010	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor	6.328.377.719	2.763.336.668	2.683.934.017	97,13		
		SUBBAG UMUM	139	4.02.07.011	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Komputer Kantor	1.767.199.383	1.527.994.560	1.515.704.042	99,20		
		SUBBAG UMUM	140	4.02.07.012	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Taman Kantor	2.639.980.760	1.292.918.474	1.280.742.484	99,06		
		SUBBAG UMUM	141	4.02.07.013	Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah	158.400.000	123.360.000	123.360.000	100,00		
		SUBBAG UMUM	142	4.02.07.014	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	16.889.451.315	-	-	#DIV/0!		
		SUBBAG UMUM	143	4.02.07.015	Pemeliharaan Lift	1.234.276.046	506.349.374	440.620.950	87,02		
		SUBBAG UMUM	144	4.02.07.016	Penyediaan sewa mesin fotokopi	2.097.849.600	2.097.849.600	1.454.745.600	69,34		
		SUBBAG UMUM	145	4.02.07.017	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14.307.841.293	12.760.897.213	7.819.780.550	61,28		
		SUBBAG UMUM	146	4.02.07.018	Penyediaan makanan dan minuman	1.217.191.511	150.000.000	119.324.300	79,55		
		SAMSAT BARAT	147	4.02.07.019	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Barat	21.638.820	21.638.820	21.486.020	99,29		
		SAMSAT BARAT	148	4.02.07.020	Penyediaan Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Barat	77.445.970	72.895.970	45.802.260	62,83		
		SAMSAT PUSAT	149	4.02.07.021	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Pusat	8.504.140	8.504.140	6.793.240	79,88		
		SAMSAT PUSAT	150	4.02.07.022	Penyediaan Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Pusat	39.688.400	36.438.400	21.889.800	60,07		
		SAMSAT SELATAN	151	4.02.07.023	Penyediaan Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Selatan	110.120.000	91.117.340	52.406.680	57,52		
		SAMSAT TIMUR	152	4.02.07.024	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Timur	30.722.360	30.722.360	26.529.860	86,35		
		SAMSAT TIMUR	153	4.02.07.025	Penyediaan Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Timur	96.155.740	93.413.740	35.180.890	37,66		
		SAMSAT UTARA	154	4.02.07.026	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	15.301.400	15.301.400	6.608.070	43,19		
		SAMSAT UTARA	155	4.02.07.027	Penyediaan Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu	80.825.380	78.086.480	44.268.620	56,69		
		UPPPD CENGKARENG	156	4.02.07.028	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Cengkareng	8.732.290	8.732.290	8.732.290	100,00		
		UPPPD CENGKARENG	157	4.02.07.029	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Cengkareng	24.843.560	20.293.560	14.529.640	71,60		
		UPPPD KALIDERES	158	4.02.07.030	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Kalideres	8.408.080	8.408.080	8.408.080	100,00		
		UPPPD KALIDERES	159	4.02.07.031	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kalideres	31.309.200	27.409.200	15.176.560	55,37		
		UPPPD TAMBORA	160	4.02.07.032	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Tambora	13.919.700	13.919.700	13.917.500	99,98		
		UPPPD TAMBORA	161	4.02.07.033	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Tambora	28.775.060	23.155.060	11.131.580	48,07		
		UPPPD GROGOL PETAMBURAN	162	4.02.07.034	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Grogol Petamburan	28.343.200	28.343.200	1.368.720	4,83		
		UPPPD GROGOL PETAMBURAN	163	4.02.07.035	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Grogol Petamburan	31.098.000	31.098.000	18.654.000	59,98		
		UPPPD TAMAN SARI	164	4.02.07.036	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di UPPRD Taman Sari	27.682.750	27.682.750	7.300.890	26,37		

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	UNIT KERJA	URAIAN			ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PENYERAPAN		KET
				NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			SPJ	%SPJ	
I. BELANJA LANGSUNG							544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
	4.02.07	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah					115.881.615.223	75.190.743.891	65.767.254.468	87,47	
		UPPPD TAMAN SARI	165	4.02.07.037	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Taman Sari	44.074.760	31.887.260	-	-		
		UPPPD KEBON JERUK	166	4.02.07.038	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Kebon Jeruk	6.882.160	6.882.160	6.547.060	95,13		
		UPPPD KEBON JERUK	167	4.02.07.039	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kebon Jeruk	31.970.010	27.485.010	18.960.160	68,98		
		UPPPD PALMERAH	168	4.02.07.040	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Palmerah	12.138.804	12.138.804	12.138.804	100,00		
		UPPPD PALMERAH	169	4.02.07.041	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Palmerah	40.205.860	35.005.860	20.703.940	59,14		
		UPPPD KEMBANGAN	170	4.02.07.042	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Kembangan	14.581.480	14.581.480	7.475.500	51,27		
		UPPPD KEMBANGAN	171	4.02.07.043	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kembangan	28.519.610	22.669.610	11.151.200	49,19		
		UPPPD TANAH ABANG	172	4.02.07.044	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Tanah Abang	4.346.595	4.346.595	4.190.175	96,40		
		UPPPD TANAH ABANG	173	4.02.07.045	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Tanah Abang	34.668.800	30.311.300	16.142.610	53,26		
		UPPPD KEMAYORAN	174	4.02.07.046	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Kemayoran	4.928.550	4.928.550	4.462.500	90,54		
		UPPPD KEMAYORAN	175	4.02.07.047	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kemayoran	26.481.500	24.186.500	9.232.700	38,17		
		UPPPD JOHAR BARU	176	4.02.07.048	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Johar Baru	6.458.510	6.458.510	6.458.360	100,00		
		UPPPD JOHAR BARU	177	4.02.07.049	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Johar Baru	30.835.292	25.925.292	12.241.740	47,22		
		UPPPD SENEN	178	4.02.07.050	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Senen	5.374.000	5.374.000	-	-		
		UPPPD SENEN	179	4.02.07.051	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Senen	31.773.000	22.835.500	1.380.700	6,05		
		UPPPD GAMBIR	180	4.02.07.052	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Gambir	7.030.176	7.030.176	4.723.709	67,19		
		UPPPD GAMBIR	181	4.02.07.053	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Gambir	47.500.650	36.435.650	8.762.580	24,05		
		UPPPD SAWAH BESAR	182	4.02.07.054	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Sawah Besar	9.885.100	9.885.100	7.758.600	78,49		
		UPPPD SAWAH BESAR	183	4.02.07.055	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Sawah Besar	29.356.000	25.488.500	10.136.100	39,77		
		UPPPD CEMPAKA PUTIH	184	4.02.07.056	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Cempaka Putih	5.114.700	5.114.700	451.520	8,83		
		UPPPD CEMPAKA PUTIH	185	4.02.07.057	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Cempaka Putih	44.868.600	38.208.600	6.385.200	16,71		
		UPPPD MENTENG	186	4.02.07.058	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Menteng	7.786.380	7.786.380	7.780.380	99,92		
		UPPPD MENTENG	187	4.02.07.059	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Menteng	47.616.020	39.231.020	21.550.500	54,93		
		UPPPD CILANDAK	188	4.02.07.060	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Cilandak	6.118.626	6.118.626	4.034.976	65,95		
		UPPPD CILANDAK	189	4.02.07.061	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Cilandak	37.626.400	28.851.400	9.824.780	34,05		
		UPPPD KEBAYORAN LAMA	190	4.02.07.062	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Kebayoran Lama	10.960.950	10.960.950	10.960.950	100,00		
		UPPPD KEBAYORAN LAMA	191	4.02.07.063	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kebayoran Lama	36.060.970	31.185.970	22.412.040	71,87		
		UPPPD KEBAYORAN BARU	192	4.02.07.064	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Kebayoran Baru	5.764.500	5.764.500	5.764.500	100,00		
		UPPPD KEBAYORAN BARU	193	4.02.07.065	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kebayoran Baru	33.988.400	30.623.400	22.007.960	71,87		

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	UNIT KERJA	URAIAN			ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PENYERAPAN		KET
				NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			SPJ	%SPJ	
I. BELANJA LANGSUNG							544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
4.02.07		Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah				115.881.615.223	75.190.743.891	65.767.254.468	87,47		
		UPPPD MAMPANG PRAPATAN	194	4.02.07.066	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Mampang Prapatan	7.610.580	7.610.580	7.610.580	100,00		
		UPPPD MAMPANG PRAPATAN	195	4.02.07.067	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Mampang Prapatan	34.914.030	30.201.530	17.564.030	58,16		
		UPPPD PASAR MINGGU	196	4.02.07.068	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Pasar Minggu	6.863.702	6.863.702	6.859.282	99,94		
		UPPPD PASAR MINGGU	197	4.02.07.069	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Pasar Minggu	51.548.990	45.698.990	15.383.630	33,66		
		UPPPD JAGAKARSA	198	4.02.07.070	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Jagakarsa	8.937.434	8.937.434	8.633.038	96,59		
		UPPPD JAGAKARSA	199	4.02.07.071	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Jagakarsa	49.001.040	42.625.540	19.181.060	45,00		
		UPPPD SETIABUDI	200	4.02.07.072	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Setiabudi	5.789.570	5.789.570	5.149.910	88,95		
		UPPPD SETIABUDI	201	4.02.07.073	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Setiabudi	50.616.640	41.256.640	19.952.670	48,36		
		UPPPD TEBET	202	4.02.07.074	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Tebet	17.559.810	17.559.810	17.559.320	100,00		
		UPPPD TEBET	203	4.02.07.075	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Tebet	42.773.830	31.583.430	13.594.120	43,04		
		UPPPD PESANGGRAHAN	204	4.02.07.076	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Pesanggrahan	4.714.906	4.714.906	4.714.906	100,00		
		UPPPD PESANGGRAHAN	205	4.02.07.077	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Pesanggrahan	44.630.040	41.040.040	30.206.620	73,60		
		UPPPD PANCORAN	206	4.02.07.078	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Pancoran	6.772.230	6.772.230	-	-		
		UPPPD PANCORAN	207	4.02.07.079	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Pancoran	40.278.640	36.598.640	17.313.000	47,31		
		UPPPD DUREN SAWIT	208	4.02.07.080	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Duren Sawit	9.729.180	9.729.180	9.197.000	94,53		
		UPPPD DUREN SAWIT	209	4.02.07.081	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Duren Sawit	19.796.350	18.896.350	6.715.420	35,54		
		UPPPD CIRACAS	210	4.02.07.082	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Ciracas	8.915.076	8.915.076	8.892.000	99,74		
		UPPPD CIRACAS	211	4.02.07.083	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Ciracas	17.382.500	16.437.500	8.192.000	49,84		
		UPPPD CAKUNG	212	4.02.07.084	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Cakung	13.795.080	13.795.080	12.941.391	93,81		
		UPPPD CAKUNG	213	4.02.07.085	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Cakung	61.831.380	55.911.380	14.638.250	26,18		
		UPPPD MATRAMAN	214	4.02.07.086	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Matraman	8.791.182	8.791.182	8.487.000	96,54		
		UPPPD MATRAMAN	215	4.02.07.087	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Matraman	18.526.890	17.176.890	11.347.370	66,06		
		UPPPD MAKASAR	216	4.02.07.088	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Makasar	9.495.000	9.495.000	9.479.700	99,84		
		UPPPD MAKASAR	217	4.02.07.089	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Makasar	34.725.120	32.470.120	12.954.700	39,90		
		UPPPD JATINEGARA	218	4.02.07.090	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Jatinegara	9.508.970	9.508.970	9.494.900	99,85		
		UPPPD JATINEGARA	219	4.02.07.091	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Jatinegara	19.476.650	17.856.650	13.170.100	73,75		
		UPPPD KRAMAT JATI	220	4.02.07.092	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Kramat Jati	12.702.786	12.702.786	12.415.280	97,74		
		UPPPD KRAMAT JATI	221	4.02.07.093	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kramat Jati	32.134.600	29.644.600	11.438.000	38,58		

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	UNIT KERJA	URAIAN			ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PENYERAPAN		KET
				NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			SPJ	%SPJ	
I. BELANJA LANGSUNG							544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
	4.02.07	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah					115.881.615.223	75.190.743.891	65.767.254.468	87,47	
		UPPPD PULOGADUNG	222	4.02.07.094	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Pulogadung	13.145.140	13.145.140	12.157.130	92,48		
		UPPPD PULOGADUNG	223	4.02.07.095	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Pulogadung	41.117.860	39.092.860	11.714.000	29,96		
		UPPPD CIPAYUNG	224	4.02.07.096	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Cipayung	15.322.200	15.322.200	14.850.535	96,92		
		UPPPD CIPAYUNG	225		Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Cipayung	31.601.000	29.441.000	9.440.000	32,06		
		UPPPD PASAR REBO	226	4.02.07.098	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Pasar Rebo	12.283.590	12.283.590	12.244.500	99,68		
		UPPPD PASAR REBO	227	4.02.07.099	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Pasar Rebo	35.259.650	33.369.650	24.358.450	73,00		
		UPPPD CILINCING	228	4.02.07.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Cilincing	7.787.604	7.787.604	7.197.828	92,43		
		UPPPD CILINCING	229	4.02.07.101	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Cilincing	23.921.510	22.625.510	4.027.000	17,80		
		UPPPD KELAPA GADING	230	4.02.07.102	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Kelapa Gading	10.070.350	10.070.350	-	-		
		UPPPD KELAPA GADING	231	4.02.07.103	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kelapa Gading	22.139.480	20.114.480	9.213.400	45,80		
		UPPPD KOJA	232	4.02.07.104	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Koja	8.576.060	8.576.060	6.450.400	75,21		
		UPPPD KOJA	233	4.02.07.105	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Koja	23.980.860	21.789.360	8.493.200	38,98		
		UPPPD KEPULAUAN SERIBU	234	4.02.07.106	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Kepulauan Seribu	2.954.004	2.954.004	2.945.300	99,71		
		UPPPD KEPULAUAN SERIBU	235	4.02.07.107	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Kepulauan Seribu	18.672.940	16.652.940	8.616.460	51,74		
		UPPPD PADEMANGAN	236	4.02.07.108	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Pademangan	10.946.250	10.946.250	10.886.000	99,45		
		UPPPD PADEMANGAN	237	4.02.07.109	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Pademangan	41.129.000	37.511.000	22.959.440	61,21		
		UPPPD PENJARINGAN	238	4.02.07.110	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Penjaringan	10.378.040	10.378.040	10.323.950	99,48		
		UPPPD PENJARINGAN	239	4.02.07.111	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Penjaringan	34.936.520	33.856.520	23.152.820	68,39		
		UPPPD TANJUNG PRIOK	240	4.02.07.112	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di UPPRD Tanjung Priok	9.142.860	9.142.860	9.142.860	100,00		
		UPPPD TANJUNG PRIOK	241	4.02.07.113	Penyediaan Makanan dan Minuman di UPPRD Tanjung Priok	34.198.180	28.023.180	15.210.700	54,28		
		UPPPD KEPULAUAN SERIBU	242	4.02.07.114	Penyediaan Sarana Prasarana dan Akomodasi UPPRD Kepulauan Seribu	241.901.913	241.901.913	241.515.000	99,84		
		SAMSAT SELATAN	243	4.02.07.116	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Jakarta Selatan	15.733.640	15.733.640	5.049.680	32,09		
		SUBBAG UMUM	244	4.02.07.117	Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	1.332.100.000	-	-	#DIV/0!		
		SUBBAG KEPEGAWAIAN	245	4.02.07.118	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan	9.109.198.338	9.109.198.338	9.003.419.099	98,84		

NO	KODE PROGRAM	NAMA PROGRAM	UNIT KERJA	URAIAN			ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PENYERAPAN		KET
				NO	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN			SPJ	%SPJ	
I. BELANJA LANGSUNG							544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
	4.02.08	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah					2.727.444.965	1.737.184.540	1.629.672.962	93,81	
		SUBBAG UMUM	246	4.02.08.001	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	285.566.200	285.566.200	181.477.900	63,55		
		SUBBAG UMUM	247	4.02.08.002	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	1.248.075.000	824.434.320	824.434.320	100,00		
		SUBBAG UMUM	248	4.02.08.003	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	1.193.803.765	627.184.020,00	623.760.742	99,45		
BELANJA LANGSUNG							544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
SALDO KAS											
BELANJA LANGSUNG + SALDOKAS							544.675.886.446	125.741.709.590	90.632.025.264	72,08	
II. BELANJA TIDAK LANGSUNG							1.242.201.630.276	672.860.882.647	374.109.752.320	55,60	
1		Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil	1		Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil	278.080.226.736	104.210.545.551	67.100.392.220	64,39		
				5.1.1.01.03.001	Gaji Pokok	38.804.971.400	39.112.173.400	37.744.929.180	96,50		
				5.1.1.01.03.002	Tunjangan Keluarga	4.401.867.616	4.415.376.272	4.142.889.516	93,83		
				5.1.1.01.03.003	Tunjangan Jabatan	1.585.915.000	1.585.915.000	1.553.015.000	97,93		
				5.1.1.01.03.006	Tunjangan Umum	1.704.145.000	1.721.085.000	1.687.230.000	98,03		
				5.1.1.01.03.008	Tunjangan Khusus (PPh)/Tunjangan PPh Gaji dan Tunjangan Kinerja	229.008.722.882	54.798.750.585	19.862.776.703	36,25		
				5.1.1.01.03.009	Tunjangan Beras	2.574.060.840	2.576.696.928	2.109.087.660	81,85		
				5.1.1.01.03.010	Pembulatan Gaji	543.998	548.366	464.161	84,64		
2		Tunjangan Peningkatan Penghasilan	2	5.1.1.02.01.005	Tunjangan Peningkatan Penghasilan	71.955.903.220	-	-	#DIV/0!		
3		Tunjangan Kinerja Daerah	3	5.1.1.02.05.002	Tunjangan Kinerja Daerah	308.705.351.000	203.822.385.278	102.007.783.267	50,05		
4		Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4	5.1.1.04.02		575.945.149.320	362.614.696.818	202.788.321.833	55,92		
5		Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)	5	5.1.1.10.01	Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)	7.515.000.000	2.213.255.000	2.213.255.000	100,00		
TOTAL BELANJA BL+BTL							1.786.877.516.722	798.602.592.237	464.741.777.584	58,19	

Berdasarkan tabel diatas, untuk Belanja Langsung terdapat 3 program yang terdiri dari Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah, Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah serta Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah pagu anggaran sebesar Rp48.813.781.159,00 dengan realisasinya sebesar Rp23.235.097.834,00 (47,60%). Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah pagu anggaran sebesar Rp75.190.743.891,00 dengan realisasinya sebesar Rp65.767.254.468,00 (87,47%). Sedangkan untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah pagu anggaran sebesar Rp1.737.184.540,00 yang realisasinya adalah Rp1.629.672.962,00 (93,81%). Sehingga total belanja langsung adalah Rp126.658.234.508,00 yang realisasinya adalah Rp91.246.063.814,00 (72,04%). Hal ini memerlukan perhatian yang khusus untuk ditingkatkan pada tahun depan Hal-hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan penyerapan realisasi anggaran diantaranya dengan persiapan secara baik dalam hal perencanaan dan perumusan anggaran kegiatan serta segera mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam hal pengadministrasian SPJ.

4

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis dan penggambaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta evaluasinya terhadap hasil kerja baik yang tercapai sesuai dengan harapan maupun yang tidak. Laporan ini diharapkan mampu memenuhi tuntutan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mana Akuntabilitas Kinerja digambarkan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pada tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 15 (lima belas) indikator kinerja utama yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Adapun sebanyak 15 (lima belas) indikator berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Hasil Reviu yang telah ditetapkan sebelumnya, diketahui bahwa rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2019 ini adalah sebesar 92,64% yang termasuk dalam interpretasi tidak mencapai target.

A. PERMASALAHAN

Secara umum target kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah tercapai sesuai yang ditetapkan. Dengan penyerapan anggaran sebesar Rp465.355.816.134,00 (58,20%) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp799.519.117.155 (APBD Perubahan 2020) dan sasaran strategis yang telah ditargetkan telah terlaksana dengan baik. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.924.784.307.119,00 atau 98,29% dari target rencana penerimaan Pajak Daerah dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2020 sebesar Rp32.480.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp40.298.117.062.826,00 maka penerimaan Pajak Daerah tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp8.373.332.755.707,00 atau 21,78%.

Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan tingkat pencapaian penerimaan sebesar Rp496.005.954.940,00 atau 105,89% dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam APBD Perubahan tahun 2020 sebesar Rp468.413.750.000,00. Secara keseluruhan realisasi penerimaan retribusi daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp91.450.642.392,00 dari realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2019 yaitu sebesar Rp587.456.597.332,00.

Namun dalam pelaksanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, di antaranya :

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak
2. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta khususnya pada sektor pembangunan dan pengembangan Sistem Pajak.

3. Rendahnya tingkat partisipasi *user* dari pihak internal dan eksternal pada pelaksanaan kegiatan Pengembangan Aplikasi Konsolidasi Data Pajak.
4. Rendahnya kepatuhan, keterbukaan, dan ketaatan pelaporan omzet dan data transaksi usaha oleh pelaku usaha dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.
5. Tingginya tuntutan dari masyarakat agar Pemerintah secara optimal menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), ditinjau dari segi transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemungutan pajak yang ada.
6. Adanya rasa sensitivitas yang cukup tinggi dari pelaku usaha selaku wajib pajak kepada Pemerintah yang kaitannya dengan kerahasiaan sistem administrasi usahanya, sehingga Pemerintah harus betul-betul menjamin kerahasiaan data transaksi usaha hanya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/Gubernur DKI Jakarta.
7. Masih belum optimalnya penyerapan dan penggunaan anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta sehingga masyarakat tidak mau membayar pajak.
8. Masih terbatasnya metode pembayaran pajak daerah contohnya penggunaan Mobile Banking, dsb.

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengefektifkan kegiatan pelaksanaan pencapaian sasaran yang belum dicapai, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah antisipatif yang ditempuh, yaitu :

1. Melakukan penagihan piutang pajak dengan pendampingan atau supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

2. Melakukan pendataan PBB-P2 (fiscal cadaster) dalam rangka pemutakhiran data
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta dalam hal Sumber Daya Manusia.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta.
5. Meningkatkan rasa keinginan Wajib Pajak untuk berkontribusi dalam kegiatan Pengembangan Aplikasi Konsolidasi Data Pajak.
6. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat melalui evaluasi penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemungutan pajak.
7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengelolaan anggaran dan terkait pemungutan pajak.
8. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan secara rutin.
9. Menghimpun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
10. Tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah seperti halnya perbaikan administrasi perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi, koordinasi, dan *law enforcement*.